



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SEMARANG
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG PRAMUSINTO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **168108**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.640.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 153 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 807 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 840.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **270.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR / MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. LAINNYA, --- (SEPEDA MTB) SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, VESPA VESPA PX Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER XPANDER CROSS 1.5L PLUS AX2 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS / NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, HONDA STYLO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **75.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.000.000.000
III. HUTANG	Rp.	385.150.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.614.850.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.